

UNIT COST SATUAN PENDIDIKAN

Said Alwi

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Lhokseumawe
e-mail: saidalwi@yahoo.com

Abstrak: Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen *instrumental input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya satuan (*unit cost*) pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan pendidikan. Biaya satuan (*unit cost*) dapat dijadikan standar dalam pemenuhan kebutuhan untuk setiap siswa disekolah. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Abstract: The cost of education is one of the components of an instrumental input that is very important in organizing education in schools and colleges. The cost of the investment units of education include the cost of the provision of infrastructure, human resource development, working capital and fixed. The cost of the unit (*unit cost*) education is the average cost incurred by each student in a certain period of time to get an education. The cost of the unit (*unit cost*) can be used as standard in the fulfillment of the requirements for each student in all schools. Persiswa Unit Cost is the cost of an average persiswa calculated from the total expenditures of the school divided the entire existing students in the school in the past year. By knowing the magnitude of the cost of a unit of persiswa according to the level and type of education is useful for assessing the various policy alternatives in an effort increase the quality of education.

Kata Kunci: Unit Cost, Satuan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu apabila negara memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, bagian keempat, pasal 11 dinyatakan secara eksplisit bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan biaya untuk pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen *instrumental input* yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan maka biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Biaya Pendidikan

Biaya merupakan salah satu aspek penunjang serta penentu dalam proses pendidikan. Dimana hampir semua proses dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya, mulai dari proses pembelajaran sampai pada aktivitas penunjang (extra kurikuler). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan.

Menurut Fattah (2009: 3.) biaya pendidikan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan juga diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihangatkan dengan uang). (Supriadi, 2003, h. 3).

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa biaya pendidikan tidak hanya berupa uang atau rupiah tetapi dalam bentuk *nonmoneter* yaitu bukan uang seperti pengorbanan waktu seseorang dalam menempuh pendidikan dan ataupun dalam bentuk barang.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*) (Fattah, 2009: 26). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis ,dll).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi tiga kelompok yaitu biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik, dan biaya satuan pendidikan. Biaya satuan pendidikan sendiri meliputi: 1) biaya investasi; 2) biaya operasional; 3) bantuan pendidikan; dan 4) beasiswa.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan ditingkat

sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Biaya Satuan (*Unit Cost*) Pendidikan

Fattah (2009: 27) mendefinisikan, "Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu."

Secara sederhana biaya satuan dihitung hanya dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa yang aktif pada tahun tertentu. Biaya satuan merupakan jumlah pengeluaran yang dipergunakan oleh setiap murid dalam suatu tahun tertentu, baik dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, atau hanya pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu, atau unguin saja dalam sekolah tertentusaja." (Jusuf, 1995: 239).

Menurut Matin, (2013: 160-161) yang mengungkapkan bahwa "Konsep biaya satuan adalah menunjuk kepada jumlah biaya rutin yang dihabiskan setiap siswa selama satu tahun ajaran. Biaya satuan dapat disebut biaya pendidikan untuk satu siswa dalam satu tahun padajenjang pendidikan tertentu.

Menurut Sahertian, 1994: 115) penentuan unit cost dapat dibagi manjadi 2 macam, yaitu:

1. Unit cost untuk keperluan rutin yaitu besar biaya yang diperlukan untuk mendidik seorang siswa pada satu tingkatan dan jenis pendidikan tertentu selama satu tahun.
2. Unit cost untuk biaya modal yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk menyediakan tempat bagi seorang siswa pada satu tingkatan dan jenis pendidikan tertentu.

Pendapat di atas membedakan *unit cost* dalam biaya operasional dan *unit cost* dalam biaya modal atau investasi, masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Jika kita ingin mengetahui berapa jumlah keperluan untuk setiap siswa setiap tahunnya maka kita menggunakan *unit cost* untuk keperluan rutin sedangkan jika ingin menambah sarana prasarana sekolah maka menghitung *unit cost* untuk biayamodal.

Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah mengatur setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam menentukan biaya satuannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK/.02/2012 tentang Standar Biaya. Disebutkan bahwa Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Standar Biaya Masukan ini berfungsi sebagai acuan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja, selain itu SBM juga berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penentuan biaya dan estimasi.

Fattah (2009: 34) mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk menghitung *unit cost*:

- a. Biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah/suatulevel;
- b. Biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan.

Idealnya dalam sistem penganggaran di Indonesia adalah menggunakan prinsip *money follow function*, yaitu di mana pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja (satuan kerja)/unit sesuai dengan amanat undang-undang. Prinsip ini menerangkan bahwa biaya atau uang yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang sudah dibuat terlebih dahulu bukan uang terlebih dulu ada kemudian baru menyusun kegiatan. Prinsip ini memungkinkan seluruh kegiatan yang ada dapat terlaksana secara tepat dan terencana.

Unit cost dihitung hanya berdasarkan kepada biaya rutin atau disebut juga dengan biaya operasional. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Penjumlahan dari semua dana yang diperoleh oleh lembaga pendidikan atau yang diperhitungkan terjadi merupakan total biaya yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bila dibagi dengan jumlah siswa akan diperoleh *unit cost*/ biaya satuan persiswa. (Saputra, 2010: 278).

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa biaya satuan (*unit cost*) pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan pendidikan. Biaya satuan (*unit cost*) dapat dijadikan standar dalam pemenuhan kebutuhan

untuk setiap siswa disekolah. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Proses Penentuan Biaya Satuan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional sekolah di satu sisi, dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan uang kepada sekolah berdasarkan jumlah murid. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Program BOS ternyata ditanggapi secara beragam oleh daerah (kabupaten/kota). Ada daerah yang mengalokasikan APBD-nya sebagai dana "pendamping BOS" (dengan jumlah yang bervariasi) dan kemudian menerapkan kebijakan "sekolah gratis", ada pula yang tetap bertahan dengan kebijakan mengizinkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah. Perbedaan respon daerah tersebut pada dasarnya dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman tentang biaya operasional pada satuan pendidikan (sekolah).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 161 tahun 2014 tentang pengalokasian dana BOS dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap. BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:

- a. SD/SDLB:Rp800.000,-/peserta didik/tahun
 - b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap:Rp1.000.000,-/peserta didik/tahun
2. SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satapdengan jumlah peserta didikdibawah 60(sekolah kecil)

Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didikkurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisoliratau di daerah tertentuyangkeberadaannya sangat diperlukan masyarakat,tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik

Biaya satuan pendidikan (BSP) yang dimaksud dalam hal ini merupakan rata-rata biaya operasional di luar biaya untuk pegawai yang dikeluarkan oleh sekolah untuk mendidik satu orang anak/murid di sekolah

Dengan penghitungan BSP berdasarkan biaya operasi,dapat diketahui berapa biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk mendidik satu orang murid. Pada dasarnya biaya operasi merupakan kebutuhan sekolah agar proses belajar-mengajar berjalan dengan baik.

Biaya personal merupakan kategori biaya yang juga penting.Biaya personal merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh peserta didik (atau orang tua/keluarga). Dengan kata lain, biaya operasional memberikan gambaran tentang biaya yang diperlukan oleh rumah tangga untuk mengirim anak ke sekolah. Dalam banyak kasus, sebagian biaya operasi dan investasi di sekolah juga menjadi tanggungan anak didik (orang tua).

Pada tahun 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada lulusan SMA dan sederajat yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk belajar di perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendiknas dan Kementerian Agama.

Bedasarkan panduan penyelenggara bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bahwakomponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah:

1. Biaya pendaftaran
 - a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara

- otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN).
- b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftarseleksi lainnya.
2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi;
 - b. UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi;
 - c. Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi.
 3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-semester dengan ketentuan:
 - a. a.Perguruan tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup melalui SK Rektor/Direktur/Ketua;
 - b. b.Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan perguruan tinggi lain dalam kabupaten/kota yang sama.
 4. Biaya Kedatangan Biaya kedatangan atau *resettlement* di alokasikan sebesar 50% kuota/jumlah mahasiswa baru @Rp1.500.000,00 dapat digunakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Penggantian biaya transport untuk mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011 atau Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan).
 - b. Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan.
 - c. Biaya pengelolaan (seleksi dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis).
 - d. Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll

Gambaran Umum Metode Penghitungan

Metode penghitungan BSP yang ditampilkan dalam panduan ini dikembangkan berdasarkan metode yang dipakai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Metode itu memiliki beberapa karakteristik: (1) yang dihitung adalah biaya minimal, (2) standar biaya dihitung berdasarkan standar-standar yang tercantum dalam PP 19/2005

Ada tiga hal yang sangat menentukan hasil penghitungan BSP:

- a. Level perhitungan BSP: Paling tidak ada tiga level yang relevan, yakni minimal, standar atau ideal. BSNP menghitung BSP pada level minimal berdasarkan berbagai standar yang berlaku. Dengan kata lain, yang dihitung adalah biaya standar minimal untuk keperluan operasional sekolah.
- b. Komponen biaya: Untuk keperluan operasional standar minimal sebagaimana tersebut dalam butir (1), komponen biaya apa saja yang perlu dimasukkan.
- c. Tingkat penggunaan: Untuk setiap komponen biaya, berapa tingkat penggunaannya (jumlah, frekuensi, dan sebagainya) untuk periode waktu tertentu.
- d. Harga: Untuk setiap komponen dan tingkat penggunaan sebagaimana tersebut dalam butir (2) dan (3), berapa harga per satuan penggunaan.

Tahapan Proses Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan

Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

Menurut Supriadi (2003, h. 15) biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari : (1) Pendapatan negara dari sektor pajak, (2) pendapatan dari sektor non pajak, (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa, (4) usaha-usaha negara lainnya, (5) bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri. Pada tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, anggaran pendidikan sebagian besar diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam RAPBD.

Biaya rata - rata per komponen pendidikan adalah biaya rata - rata yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah per tahun anggaran. Biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid di sekolah. Dengan demikian, biaya rata - rata ini dapat diketahui dengan cara membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah per komponen tiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan.

Hasil akhir proses penghitungan BSP di daerah adalah tersusunnya kebijakan yang pembiayaan pendidikan di daerah yang antara lain mengacu pada hasil penghitungan BSP. Kebijakan tersebut bisa berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau pun SK Bupati.

Klasifikasi Biaya Satuan Pendidikan

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung biaya pendidikan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan sekolah adalah mengklasifikasikan sekolah berdasarkan besarnya ukuran sekolah. Acuan yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan ukuran atau tipe sekolah adalah Keputusan Mendiknas no. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diperbaharui dengan Keputusan Mendiknas no. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan. Atas dasar SK Mendiknas tersebut, masing - masing Direktorat Teknis (TK/SD, SLTP, SMA, dan SMK) telah menyusun Standarisasi Bangunan dan Perabot untuk masing - masing tingkat sekolah.

Penyusunan standarisasi tersebut dilakukan dengan berpedoman pada klasifikasi tipe sekolah. Kriteria yang digunakan dalam menentukan tipe sekolah. Kriteria yang digunakan dalam menentukan tipe sekolah, adalah:

- a. Rombongan belajar (rombel)
- b. Peserta didik tiap satu rombongan belajar
- c. Tenaga kependidikan: Kepala Sekolah, Tenaga Tata Usaha, Laboran, Pustakawan, Satpam, Teknisi Lainnya, dan Penjaga Sekolah.
- d. Tenaga pendidik (guru)

- e. Ruang belajar, ruang kantor dan ruang penunjang lainnya
- f. Luas tanah dan lingkungan lokasi sekolah.

Adapun tipe urutan SMP yang dikembangkan sekarang ini menurut BSNP adalah:

- a. SMP tipe A, terdiri atas 27 rombel : Tipe A1 terdiri atas 24 rombel : Tipe A2 terdiri atas 21 rombel.
- b. SMP tipe B, terdiri atas 18 rombel : Tipe B1 terdiri atas 15 rombel : Tipe B2 terdiri atas 12 rombel.
- c. SMP tipe C terdiri atas 9 rombel : Tipe C1 terdiri atas 6 rombel : Tipe C2 terdiri atas 3 rombel

Semua tipe dilengkapi dengan kriteria berikut (dengan jumlah tertentu sesuai masing- masing tipe):

- a. Rombel maksimum 40 siswa per rombel
- b. Tenaga kependidikan : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha, dan Penjaga Sekolah.
- c. Ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang
- d. Luas tanah dan lingkungan/ lokasi sekolah.

Besar biaya pendidikan yang dibutuhkan masing-masing tipe sekolah sangat tergantung sumber daya yang dibutuhkan untuk pelayanan pendidikan di masing- masing sekolah tersebut. Dengan demikian masing-masing sekolah kebutuhan biaya pendidikan dapat terpenuhi.

Teori Perhitungan Biaya Pendidikan

Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Untuk menentukan biaya satuan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. (Fattah, 2009: 35).

Pendekatan makro meninjau biaya di tingkat makro kebijakan negara, sedangkan pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini

merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Perhitungan biaya satuan pendidikan dapat dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) : M(s,t)]$$

Keterangan:

- S_b : biaya satuan pendidikan murid per tahun
 K : jumlah seluruh pengeluaran.
 M : jumlah murid
 s : sekolah tertentu, t : tahun tertentu

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji dan dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya per satuan siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah total (*aggregate*) biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orangtua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran.

Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lain.

Satuan Biaya Pendidikan dalam Islam

Pendidikan Islam pada masa lalu sempat mengalami masa keemasan. Hal itu dibuktikan dengan catatan para peneliti sejarah pendidikan Islam mengenai nama-nama lembaga pendidikan yang pernah muncul dalam sejarah Islam di masa klasik dan telah memberi jasa besar bagi perkembangan intelektual dalam Islam. Lembaga-lembaga pendidikan itu di antaranya adalah seperti Dar al-Hikmah, al-Khanat, al-Bimaristan, ar-Ribath, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, akhirnya muncul lembaga pendidikan yang tertata rapih dan proses pendidikan dan pengajarannya berlangsung secara lebih sistematis. Inilah yang

disebut madrasah, lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai puncak dari perkembangan lembaga pendidikan, tempat proses belajar-mengajar berlangsung dalam Islam.

Hal yang membedakan antara Islam dengan neoliberalisme adalah dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara.

Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan “*iwān*” (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan.

Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu. Madrasah Nizham Al-Mulk mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa besarnya untuk membiayai pendidikan. Ia mengeluarkan anggaran untuk pendidikan sebesar 600.000 dinar atau lebih dari 100 trilyun rupiah setiap tahun untuk seluruh madrasah dibawah pemerintah (Supriadi, 2008, h. 105).

Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (*baitul mal*). Terbentuknya *bait al-mal* tersebut dimulai pada masa Umar ibn al-Khatthab. Dimana untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapi eksekutifnya dengan beberapa jawatan, antara lain: a) Dewan *al-Kharraj* (Jawatan Pajak); b) Dewan *al-Addats* (Jawatan Kepolisian); c) *Nazar al-Nafiat* (Jawatan Pekerjaan Umum); d) Dewan *al-Jund* (Jawatan Militer); e) *Bait al-Mal* (Lembaga Pembendaharaan Negara).

Biaya pendidikan dari *bait al-mal* itu secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. *Pertama*, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan

lain-lain. *Kedua*, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan - baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif - biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Biaya satuan (*unit cost*) pendidikan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan pendidikan. Biaya satuan (*unit cost*) dapat dijadikan standar dalam pemenuhan kebutuhan untuk setiap siswa di sekolah. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, N. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jusuf, E. (1995). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Matin, (2013). *Perencanaan Pendidikan: Perspektif Proses dan teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sahertian, P A. (1994). *Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Saputra, U. (2010). *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama
- Supriadi, D. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia